

## PEMBINAAN PROFESIONAL GURU SD DAERAH TERPENCIL

Nunung P. Rahayu\*, Piter Joko Nugroho, Teti Berliani

FKIP, Universitas Palangka Raya

\*E-mail: nunungprahayu@gmail.com

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Pembinaan profesional guru SD daerah terpencil di wilayah kerja UPTD Kecamatan Damang Batu, dilihat dari aspek: (1) Pembinaan profesional guru SD melalui: (a) *Intensive Development*, (b) *Cooperative Development*, (c) *Self-Directed Development*, dan (2) Faktor pendukung dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan profesional guru SD daerah terpencil. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi dokumentasi. Penetapan sumber data dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pola interaktif Miles dan Huberman (1994). Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan derajat kepercayaan (*credibility*) melalui teknik triangulasi baik sumber maupun metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pembinaan profesional guru SD daerah terpencil, melalui: (a) *Intensive Development*, dilaksanakan melalui kegiatan yang lazim ditujukan untuk mengembangkan profesional guru serta program kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan guru; (b) *Cooperative Development*, dilaksanakan melalui kegiatan kunjungan ke sekolah lain, *sharing* pengalaman dengan sejawat, aktif dalam kegiatan MGMP, serta saling mendukung untuk meningkatkan motivasi kerja; dan (c) *Self-Directed Development*, dilaksanakan melalui kegiatan pembuatan media ajar, aktif membaca buku di perpustakaan sekolah, aktif mengikuti seminar/pelatihan, serta aktif mencari bahan ajar baru jika memiliki kesempatan untuk mengakses internet; dan (2) Faktor pendukung meliputi terjalannya kerjasama yang sinergis antara Dinas Pendidikan, UPTD, pengawas, kepala sekolah dan guru; sedangkan faktor kendala belum semua guru mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program pembinaan profesional disebabkan kondisi geografis serta sukarnya akses dari dan menuju ke sekolah tersebut.

**Kata Kunci:** Pembinaan Profesional, Guru SD, Daerah Terpencil.

**Abstract:** This study aims to describe the professional development of elementary school teachers in remote areas in the UPTD Damang Batu working area, seen from the aspects of: (1) elementary teacher professional development through: (a) Intensive Development, (b) Cooperative Development, (c) Self Directed Development, and (2) Supporting factors and obstacles encountered in the professional development of remote area elementary school teachers. This research is a qualitative research with a case study design. Data collection is done by methods: in-depth interviews (indepth interview), participant observation (participant observation), and study documentation (study of document). Determination of data sources is done by using purposive sampling technique. Data analysis was performed using the interactive patterns of Miles and Huberman (1994). Checking the validity of the data is done by using a degree of credibility through both source and method triangulation techniques. The results of the study show that: (1) Professional development of elementary school teachers in remote areas, through: (a) Intensive Development, carried out through activities commonly aimed at developing teacher professionals and program activities that are tailored to the needs of teachers; (b) Cooperative Development, carried out through visits to other schools, sharing experiences with colleagues, being active in MGMP activities, and supporting each other to increase work motivation; and (c) Self-Directed Development, carried out through teaching media manufacturing activities, actively reading books in school libraries, actively participating in seminars / training, and actively seeking new teaching materials if they have the opportunity to access the internet; and (2) Supporting factors include the establishment of synergic cooperation between the Education Office, UPTD, supervisors, school principals and teachers; while the constraint factor is not all teachers have the opportunity to participate in a professional development program due to geographical conditions and the difficulty of access to and from the school.

**Keywords :** Professional Development, Elementary Teacher, Remote Area.

### PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia dan masyarakat dari suatu bangsa. Seringkali kebesaran suatu bangsa diukur dari sejauhmana masyarakatny amengenyam pendidikan. Semakin tinggi

pendidikan yang dimiliki oleh suatu masyarakat, maka semakin majulah bangsa tersebut. Koswara dan Triatna (2011) mengemukakan bahwa kualitas pendidikan sesungguhnya tida ksematamata dilihat dari kemegahan fasilitas pendidikan yang dimiliki, melainkan

sejauh mana *output* yang dihasilkan dari suatu pendidikan tersebut dapat menjadi manusia yang paripurna; karena fungsi pendidikan pada dasarnya adalah membimbing anak kearah suatu tujuan yang bernilai tinggi seperti yang diamanatkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 dalam Pasal 3 dijelaskan fungsi pendidikan adalah “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Dalam upaya mewujudkan fungsi pendidikan sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundangan tersebut, sekolah sebagai lembaga penyiap generasi muda calon pemimpin bangsa di masa depan haruslah dapat menjadi lembaga pendidikan yang mampu memberikan pelayanan yang maksimal bagi peserta didik agar mereka dapat mengembangkan berbagai potensi diri yang dimilikinya. Setiap sekolah dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan yang diselenggarakan melalui peningkatan kualitas pembelajaran yang mampu mengaktualisasikan ketiga dimensi kemanusiaan yang paling elementer, yaitu: (1) Afektif, yang tercermin pada kualitas keimanan dan ketaqwaan, etika dan estetika serta akhlak mulia dan budi pekerti luhur; (2) Kognitif, yang tercermin pada kapasitas berpikir dan daya intelektualitas untuk menggali ilmu pengetahuan dan mengembangkan serta menguasai teknologi; dan (3) Psikomotor, yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis dan kecakapan praktis (PP Nomor 19 Tahun 2005). Dalam upaya tersebut proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah harus dilaksanakan dengan baik

melalui olah otak, olah hati, olah raga dan olah rasa yang diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik (PP 32 Tahun 2013, Pasal 19); sehingga dapat diartikan semuanya ini pada akhirnya akan bermuara pada bagaimana menyiapkan para peserta didik untuk mampu menjalankan kehidupan (*preparing children for life*), dan bukan sekedar mempersiapkan peserta didik untuk menjadi manusia yang hanya mampu menjalankan hidupnya. Oleh karenanya proses pendidikan yang dilaksanakan di sekolah harus dapat menjadi wahana strategis bagi upaya mengembangkan segenap potensi individu atau bertujuan untuk membantu para peserta didik untuk dapat memuliakan hidupnya (*ennabling life*) (Tjalla, 2010).

Sekolah merupakan institusi yang kompleks (Gorton, 1976; Snyder & Anderson, 1985), bahkan paling kompleks diantara keseluruhan institusi sosial (Hanson, 1985). Kompleksitas tersebut, bukan saja dari masukannya yang bervariasi, melainkan dari proses pembelajaran yang diselenggarakan di dalamnya (McPherson, 1986). Sebagai institusi yang kompleks, sekolah tidak akan menjadi baik dengan sendirinya, melainkan melalui proses peningkatan tertentu. Dalam rangka proses peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah diperlukan guru, baik secara individual maupun kolaboratif untuk melakukan sesuatu, mengubah “*status quo*” agar pendidikan dan pembelajaran menjadi lebih berkualitas. Pendidikan dan pembelajaran berkualitas memang tidak bergantung kepada satu komponen saja misalnya guru, melainkan sebagai sebuah sistem yang saling mendukung antara komponen satu dan lainnya seperti: program kegiatan pembelajaran, murid,

sarana-prasarana pembelajaran, pendanaan, lingkungan masyarakat, dan kepemimpinan kepala sekolah. Semua komponen tersebut sangat penting dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan institusional. Program kegiatan pembelajaran–kurikulum, silabus, rencana pembelajaran, dan sejumlah pedoman pelaksanaannya merupakan pedoman kegiatan pembelajaran dalam memberikan kesempatan kepada murid untuk mendapatkan pengalaman belajar yang maksimal, sesuai dengan tingkat kemampuannya, dan yang lebih penting lagi adalah bermanfaat bagi kehidupannya di masa yang akan datang. Sarana dan prasarana baik yang habis dan tidak habis pakai, bergerak maupun tidak bergerak, berhubungan langsung maupun tidak dengan proses pembelajaran sangat diperlukan untuk memperlancar pengelolaan pembelajaran dalam memberikan kesempatan murid memperoleh pengalaman belajar. Namun semua komponen yang terindikasi di atas tidak akan berguna bagi terjadinya perolehan pengalaman belajar maksimal bagi peserta didik bilamana tidak didukung oleh keberadaan guru yang profesional (Bafadal, 2003).

Mutu pendidikan pada jenjang pendidikan persekolahan sangat berkorelasi dengan kualitas guru, terlebih pada jenjang pendidikan dasar kualitas pendidikan dasar sangat dipengaruhi oleh tingkat profesionalitas gurunya (Bafadal, 2003). Oleh karenanya dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, sangat diperlukan guru dalam standar mutu kompetensi dan profesionalisme yang terjamin. Untuk mencapai jumlah guru profesional yang dapat menggerakkan dinamika kemajuan pendidikan nasional diperlukan suatu proses pembinaan berkesinambungan, tepat sasaran dan efektif. Proses menuju guru profesional ini perlu didukung oleh semua unsur yang terkait dengan guru. Unsur–unsur tersebut dapat dipadukan

untuk menghasilkan suatu sistem yang dapat dengan sendirinya bekerja menuju pembentukan guru-guru yang profesional dalam kualitas maupun kuantitas yang mencukupi (Mustofa, 2007). Semakin guru tersebut mampu memberikan pelayanan “prima” dalam pembelajaran, peserta didik pun akan semakin antusias dalam menyerap pelajaran sehingga hasil *output* yang dihasilkan pun akan lebih optimal (Arifin, 2010).

Indonesia merupakan Negara kepulauan terluas di dunia yang memiliki luas wilayah  $\pm 17.050$  pulau sekaligus pula sebagai Negara yang memiliki populasi penduduk ke-4 (keempat) terbanyak di dunia. Jumlah populasi penduduk di Indonesia berdasarkan data BPS tahun 2015 sebanyak  $\pm 235$  juta jiwa, terdiri atas beragam suku, bahasa, agama maupun adat istiadat. Disatu sisi kekayaan keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri karena hal tersebut tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain; namun di sisi lain dengan luasnya wilayah yang tersebar dalam gugusan kepulauan yang terpisah satu dengan lainnya ditambah dengan kondisi geografis yang berbeda satu dengan lainnya tentu akan menimbulkan hambatan dan persoalan dalam pembangunan bangsa termasuk pembangunan dibidang pendidikan.

Pada wilayah Jawa dan Sumatera sebagai pulau yang memiliki populasi penduduk yang relatif banyak dan didukung dengan akses transportasi dan komunikasi yang baik hampir tidak ditemukan permasalahan yang berarti dalam pembangunan pendidikan. Kualitas pendidikan di wilayah tersebut dapat dikatakan relatif lebih maju jika dibandingkan daerah lainnya karena selain tersedianya akses transportasi dan komunikasi yang memadai, juga didukung dengan tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana yang memadai (Khasanah, 2014). Hal tersebut berbanding terbalik jika

dibandingkan dengan pulau-pulau di luar Jawa seperti Kalimantan, Sulawesi, Papua maupun gugusan kepulauan kecil lainnya yang memiliki wilayah yang masuk dalam kategori terpencil. Minimnya akses transportasi dan komunikasi yang diperparah dengan minimnya jumlah tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana pendidikan baik dari segi kuantitas maupun kualitas menyebabkan kualitas pendidikan pada wilayah-wilayah tersebut kondisinya masih jauh dari yang diharapkan.

Daerah terpencil mencakup pengertian keterpencilan secara fisik dan kultural (Supriadi, 1990). Khusus untuk daerah terpencil secara fisik adalah suatu daerah yang jauh atau sukar untuk dijangkau oleh sarana komunikasi dan transportasi, yang dibarengi dengan kondisi geografis yang kurang menguntungkan. Daerah dengan kondisi semacam ini menyebabkan masyarakatnya terkurung atau terisolasi dari daerah-daerah sekitarnya. Daerah ini meliputi: a) daerah terpencil daratan pedalaman, b) daerah terpencil pantai dan aliran sungai, c) daerah terpencil perairan, kepulauan, dan pembatasan internasional. Indonesia merupakan Negara yang memiliki keseluruhan tipikal keterpencilan daerah tersebut, dimana hingga kini permasalahan pendidikan yang belum merata pada daerah terpencil masih menjadi kendala utama yang menghambat laju pembangunan pendidikan di Negara kita.

Para peneliti pendidikan sepakat bahwa keterpencilan suatu daerah akan menimbulkan hambatan dan kesukaran dalam penyelenggaraan sistem pendidikan (Sher dan Sher, 1994). Rendahnya kualitas guru, terbatasnya program pengembangan profesi (Gandara et al, 2001), serta ketidakmampuan untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas guru merupakan permasalahan nyata yang dihadapi oleh guru daerah terpencil (Arnold, 2001). Karakteristik guru daerah terpencil tersebut juga

dijumpai pada daerah-daerah terpencil yang terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah, dimana rendahnya kualitas guru menjadi persoalan serius yang menghambat laju pembangunan pendidikan di wilayah tersebut. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (dalam Nugroho, 2013) menyimpulkan beberapa karakteristik guru SD yang bertugas pada daerah terpencil daratan pedalaman, antara lain: a) pada umumnya guru mengajar secara klasikal dan cenderung bersifat verbalistik, b) kemampuan mengajar dan kemampuan untuk melakukan inovasi pembelajaran belum berkembang dengan baik, c) guru lebih mendahulukan kepentingan pribadi/keluarga daripada tugas pokoknya di sekolah, sehingga karena sesuatu dan lain hal guru harus meninggalkan kampung dan sekolah harus diliburkan, dan e) rata-rata guru belum memahami berbagai pembaharuan pendidikan yang berlaku saat ini.

Karakteristik daerah terpencil tampil dengan ciri geografis, sosio kultural dan pendidikan yang khas, sehingga membutuhkan pendekatan tersendiri dalam penanganan pendidikannya (Siram, 1992). Glass (dalam Heslop, 1996) menjelaskan bahwa dampak tinggal di *setting* daerah terpencil seharusnya tidak dianggap remeh karena para guru yang bertugas pada daerah terpencil sama halnya dengan berpindah tugas atau mengabdikan ke bagian dunia yang lain. Dukungan dan keseriusan pemerintah dalam mengawal profesionalisme guru melalui berbagai langkah strategis serta program yang tepat sasaran akan sangat menentukan kualitas pendidikan di wilayah tersebut (Nugroho, 2017).

Problematika pendidikan pada daerah terpencil juga dihadapi oleh Kabupaten Gunung Mas sebagai salah satu kabupaten pemekaran di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Gunung Mas merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Kapuas

berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan kabupaten Katingan, kabupaten Seruyan, kabupaten Sukamara, kabupaten Lamandau, kabupaten Gunung Mas, kabupaten Pulang Pisau, kabupaten Murung Raya, dan kabupaten Barito Timur di provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten ini berpenduduk sejumlah 96.838 jiwa dengan luas wilayah sebesar 10.804 km<sup>2</sup> (Sensus 2010). Perbandingan luasnya wilayah dengan jumlah penduduk yang masih dapat dikatakan relatif sedikit dengan penyebaran penduduk yang belum merata pada kantong-kantong pemukiman penduduk yang terpisah satu dengan lainnya, ditambah dengan kondisi geografis dan terbatasnya akses transportasi dan komunikasi, tentu sedikit banyaknya menghambat laju pembangunan termasuk pembangunan dalam bidang pendidikan.

Berdasarkan Laporan Tahunan Dinas Pendidikan kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 teridentifikasi beberapa permasalahan pendidikan yang dihadapi Kabupaten Gunung Mas, dan yang paling menonjol adalah berkaitan dengan belum meratanya akses pendidikan serta rendahnya kualitas guru pada jenjang pendidikan dasar termasuk mereka yang bertugas pada daerah terpencil. Rendahnya kualitas guru tersebut secara umum dapat terlihat pula dari hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang dilaksanakan pada tahun 2015 yang lalu. Berdasarkan hasil UKG tahun 2015 diketahui bahwa nilai rata-rata UKG dari 12 (dua belas) kecamatan yang ada pada wilayah Kabupaten Gunung Mas berada pada skor sebesar 53, sehingga dapat diartikan secara umum nilai UKG guru SD Kabupaten Gunung Mas tergolong rendah karena berada dibawah Standar Kompetensi Minimum (SKM) UKG Nasional sebesar 55. Namun jika dilihat nilai rata-rata per-kecamatan, diketahui bahwa para guru SD yang bertugas pada wilayah Kecamatan Damang Batu

memperoleh nilai rata-rata UKG tertinggi jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya dengan skor sebesar 56 (Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas, 2016). Capaian perolehan hasil UKG dari para guru SD yang bertugas pada wilayah Kecamatan Damang Batu ini dapat dikatakan tergolong unik mengingat berbagai kendala yang secara umum dihadapi oleh para guru yang bertugas jauh dari wilayah ibukota kabupaten. Hal inilah yang menggugah ketertarikan peneliti untuk melihat secara lebih jauh tentang fenomena tersebut. Secara umum pelaksanaan UKG ditujukan untuk mengukur profesionalisme guru dengan cara mengetahui level dari kompetensi individu guru yang melalui peta penguasaan guru pada kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Dalam pelaksanaannya UKG difokuskan untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan guru dalam penguasaan dari kedua kompetensi tersebut (Kemendikbud, 2015). Hasil UKG pada dasarnya bukan merupakan resertifikasi atau uji kompetensi ulang, dan juga bukan ditujukan untuk memutus tunjangan profesi (Kemendikbud, 2012), melainkan hasil UKG digunakan sebagai dasar acuan yang akan ditindaklanjuti dalam kebijakan pembinaan guru dimasa yang akan datang (Mulyasa, 2013).

Fenomena capaian hasil UKG yang diperoleh oleh para guru SD di wilayah Kecamatan Damang Batu tersebut di atas tentu tidak lepas dari peran nyata dari berbagai pihak (*stakeholder*) yang bertanggung jawab terhadap peningkatan profesional guru. Rohani (2004) menjelaskan bahwa pembinaan guru merupakan serangkaian bantuan yang berwujud layanan profesional yang diberikan oleh orang yang lebih ahli (Kepala Sekolah, Pengawas, ahli lainnya) kepada guru dengan maksud agar dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar, sehingga tujuan pendidikan yang direncanakan dapat tercapai. Pendapat tersebut memberikan makna bahwa

peningkatan dan capaian profesionalisme guru tentu tidak mungkin dilakukan oleh guru dengan sendirinya, melainkan terdapat pihak-pihak yang berperan dalam mewujudkannya. Gaffar (1987) menjelaskan bahwa konsep pengembangan profesionalisme guru mengandung 2 (dua) arti, yaitu: (1) dikaitkan dengan usaha peningkatan kemampuan profesional yang dapat dilakukan secara independen pada tingkat sekolah oleh individu masing-masing, dan (2) dikaitkan dengan jenjang karir kepegawaian dan ini harus dipolakan dari tingkat yang lebih tinggi. Dalam upaya pengembangan profesionalisme guru,

Glatthorn (1995) secara spesifik mengelompokkan kegiatan pengembangan profesional guru ke dalam tiga bagian, yaitu: (1) Pengembangan intensif (*intensive development*), (2) Pengembangan kooperatif (*cooperative development*), dan (3) Pengembangan mandiri (*self-directed development*). Pengembangan intensif (*intensive development*) adalah bentuk pengembangan yang dilakukan pimpinan/atasan terhadap guru yang dilakukan secara intensif berdasarkan kebutuhan guru. Model ini biasanya dilakukan melalui langkah-langkah yang sistematis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pertemuan balikan atau refleksi. Pengembangan kooperatif (*cooperative development*) adalah suatu bentuk pengembangan guru yang dilakukan melalui kerja sama dengan teman sejawat dalam suatu tim yang bekerja sama secara sistematis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan profesional guru melalui pemberian masukan, saran, nasehat, atau bantuan teman sejawat. Pengembangan mandiri (*self-directed development*) adalah bentuk pengembangan yang dilakukan melalui pengembangan diri sendiri. Bentuk ini memberikan otonomi secara luas kepada guru. Guru berusaha untuk merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan, dan

menganalisis balikan untuk pengembangan diri sendiri.

Berdasarkan uraian konteks penelitian tersebut di atas, tentang: (1) pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia dan masyarakat dari suatu bangsa, (2) kualitas pendidikan sesungguhnya tidak semata-mata dilihat dari kemegahan fasilitas pendidikan yang dimiliki, melainkan sejauh mana *output* yang dihasilkan dari suatu pendidikan tersebut dapat menjadi manusia yang paripurna, (3) dalam upaya mewujudkan fungsi pendidikan sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundangan, sekolah haruslah dapat menjadi lembaga pendidikan yang mampu memberikan pelayanan yang maksimal bagi peserta didik agar mereka dapat mengembangkan berbagai potensi diri yang dimilikinya, (4) Mutu pendidikan pada jenjang pendidikan persekolahan sangat berkorelasi dengan kualitas guru, terlebih pada jenjang pendidikan dasar kualitas pendidikan dasar sangat dipengaruhi oleh tingkat profesionalitas gurunya, (5) Rendahnya kualitas guru merupakan permasalahan yang dihadapi oleh pendidikan di Indonesia khususnya guru yang bertugas pada daerah terpencil, (6) Permasalahan rendahnya kualitas guru pada daerah terpencil di Kabupaten Gunung Mas merupakan hingga kini masih menjadi permasalahan serius yang harus segera diselesaikan dalam upaya mewujudkan pembangunan dan pemerataan pendidikan di wilayah tersebut, dan (7) Hasil UKG yang baik dari para guru SD yang bertugas pada wilayah kecamatan Damang Batu sebagai salah satu kecamatan yang berada pada daerah terpencil di Kabupaten Gunung Mas merupakan fenomena yang unik mengingat berbagai kendala yang dihadapi oleh para guru SD daerah terpencil, maka penelitian tentang “Pembinaan Profesional Guru SD Daerah Terpencil (Studi Kasus pada Wilayah Kerja UPT-DPK Kecamatan Damang

Batu Kabupaten Gunung Mas) penting untuk dilaksanakan.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus. Kasus yang diangkat dalam penelitian ini tentang Pembinaan profesional guru SD daerah terpencil di wilayah kerja UPTD Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik: (1) wawancara mendalam (*indepth interview*), (2) observasi partisipan (*participant observation*), dan (3) studi dokumentasi (*study of document*). Penetapan informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pola interaktif Miles dan Huberman (1994). Pengecekan keabsahan data yang diperoleh dilakukan dengan menggunakan derajat kepercayaan (*credibility*) melalui teknik triangulasi baik sumber maupun metode.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pembinaan Profesional Guru SD Daerah Terpencil**

#### *a) Intensive Development*

Berdasarkan hasil temuan penelitian, diketahui bahwa pembinaan yang dilakukan oleh pihak pimpinan mulai dari Dinas Pendidikan, UPT-DPK Kecamatan, Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah dilakukan melalui kegiatan: (1) Pelatihan pendidik untuk memenuhi standar kompetensi, (2) Bimbingan teknis peningkatan kompetensi pedagogik guru melalui KKG (Kelompok Kerja Guru), (3) Program Sertifikasi guru, (4) Uji Kompetensi Guru, (5) Sosialisasi ke sekolah-sekolah, (6) Pendekatan individu (kegiatan diskusi intensif), (7) Pendekatan kelompok (Kelompok Kerja Guru, Workshop dan Pelatihan), (8) Supervisi, (9) Pemberian Motivasi kepada Guru, (10) Meningkatkan kedisiplinan waktu dalam

mengajar disekolah, (11) Memberikan penghargaan kepada guru-guru yang berprestasi, (12) Mendorong guru untuk menambah pengetahuannya dengan membaca buku-buku pendidikan agar kemampuan dan keterampilannya terasah.

Berbagai upaya pembinaan yang sudah dilakukan oleh pimpinan mulia dari jenjang Dinas Pendidikan, UPTD, Pengawas dan Kepala Sekolah bagi para guruSD yang mengajar pada daerah terpencil di kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas senada dengan penjelasan Depdiknas (2005) bahwa dalam upaya meningkatkan kemampuan profesional guru di sekolah dasar dapat dilaksanakan melalui2 (dua) macam kegiatan pembinaan, yaitu: (1) pembinaan kemampuan pegawai sekolah dasar melalui supervisi pendidikan, program sertifikasi, dan tugas belajar, dan (2) pembinaan moral kerja guru sekolah dasar melalui pembinaan kesejahteraan-nya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa beberapa alternatif program pengembangan profesionalisme guru juga dapat dilakukan melalui: (1) program peningkatan kualifikasi pendidikan guru, (2) program penyeteraan dan sertifikasi, (3) program pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi, (4) program supervisi pendidikan, (5) program pemberdayaan KKG/MGMP, (6) simposium guru, (7) program pelatihan tradisional lainnya, (8) membaca dan menulis jurnal atau karya ilmiah, (9) berpartisipasi dalam pertemuan ilmiah, (10) melakukan penelitian (khususnya penelitian tindakan kelas), (11) magang, (12) mengikuti berita aktual dari media pemberitaan, (13) berpartisipasi dan aktif dalam organisasi profesi, dan (14) menggalang kerjasama dengan teman sejawat”.

#### *b) Cooperative Development*

Berdasarkan hasil temuan penelitian, diketahui bahwa pembinaan yang dilakukan secara *cooperative* atau melalui kerjasama bersamatemannya sejawat dalam suatu tim yang bekerjasama secara sistematis dilakukan melalui kegiatan: (1)

Mengadakan kunjungan guru ke sekolah lain, (2) *Sharing* pengalaman dengan teman sejawat, (3) Aktif dalam kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), (4) Saling mendukung untuk meningkatkan motivasi kerja.

Berbagai upaya pembinaan yang dilakukan para guru SD daerah terpencil bersama dengan teman sejawat sejalan dengan pendapat Collete dan Chiappetta (1994) bahwa pengembangan profesional bagi guru yang dilakukan secara bersama dengan teman sejawat dapat ditempuh melalui beberapa cara seperti studi lanjut, *inservice training*, memberdayakan MGMP, memberdayakan organisasi profesi, mengevaluasi kinerja mengajar didalam kelas". Perihal senada juga diungkap Kemendiknas (dalam Saud, 2009) beberapa alternatif program pengembangan profesional guru yang dapat dilakukan secara kooperatif, meliputi: (1) program pengembangan profesional guru dalam wadah MGMP, (2) membaca dan menulis jurnal atau karya ilmiah secara kolektif, (3) berpartisipasi dan aktif dalam organisasi profesi, dan (4) menggalang kerjasama dengan teman sejawat".

#### c) *Self-Directed Development*

Berdasarkan hasil temuan penelitian, diketahui bahwa pembinaan yang dilakukan oleh guru secara mandiri/individu dilakukan melalui kegiatan: (1) kreativitas dalam membuat media ajar dengan melihat contoh-contoh yang ada perpustakaan sekolah, (2) aktif mengikuti seminar maupun pelatihan guru, (3) aktif mencari bahan ajar dan materi pelajaran jika memiliki kesempatan untuk mengakses internet di kecamatan maupun ibukota kabupaten.

Berbagai upaya pembinaan profesional yang dilakukan secara individu/mandiri oleh para guru SD daerah terpencil sejalan dengan pendapat Castetter (dalam Saud, 2009) bahwa pengembangan profesional guru dapat dilakukan melalui 5 (lima) model, yaitu: (1) pengembangan guru yang dipandu

secara *individual (individual guided staff development)*, (2) observasi atau penilaian (*observation/assessment*), (3) keterlibatan dalam proses pengembangan/ peningkatan (*involve-ment in a development/ improvement process*), (4) pelatihan (*training*), dan (5) pemeriksaan (*inquiry*)". Seyfarth (2002) juga menyampaikan hal yang senada bahwa secara teoritis pengembangan kemampuan guru dapat dilakukan melalui banyak hal, yaitu sebagai berikut: (1) studi lanjut, (2) kerja atau diskusi kelompok, (3) belajar mandiri (membaca, memanfaatkan fasilitas pendidikan di sekolah, seperti perpustakaan, laboratorium sains serta internet), (4) pelatihan dari sekolah maupun luar sekolah, dan (5) berdiskusi dengan rekan sejawat, pimpinan, dan siswa."

## **2. Faktor Pendukung dan Kendala dalam Pembinaan Profesional Guru SD Daerah Terpencil**

### a) Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil temuan penelitian tentang faktor pendukung dalam pembinaan profesional guru SD daerah terpencil adalah terjalannya kerjasama yang sinergis antara Dinas Pendidikan, UPT-DPK, pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru yang direalisasikan ke dalam program pengembangan profesional guru pada UPTD di wilayah kerja kecamatan Damang Batu baik program rutin maupun insidental yang disesuaikan dengan kebutuhan guru. Beberapa program rutin hasil kerjasama sinergis dari berbagai unsur tersebut antara lain: Bimtek peningkatan kompetensi pedagogik guru dalam wadah KKG yang didukung penuh oleh Dinas pendidikan maupun UPTD Kecamatan Damang Batu, Program pemantapan dalam persiapan sertifikasi guru, Supervisi rutin dari para pengawas sekolah serta berbagai program lainnya yang berorientasi pada peningkatan profesional guru. Program-program tersebut dapat berjalan cukup efektif

khususnya bagi para guru yang bertugas pada SD terpencil yang secara geografis dapat dijangkau melalui akses jalan darat.

b) Kendala

Kendala yang dihadapi dalam pembinaan profesional guru SD daerah terpencil adalah terkait dengan belum semua guru mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program pembinaan profesional baik dari Dinas Pendidikan maupun UPTD Kecamatan Damang Batu. Faktor yang menyebabkan kondisi tersebut adalah letak sekolah yang secara geografis sangat jauh dan sukar untuk dijangkau khususnya melalui akses transportasi darat, terlebih lagi pada musim penghujan. Dengan kondisi demikian praktis program pembinaan profesional yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan maupun UPTD Kecamatan Damang Batu belum dapat secara rutin dilaksanakan di sekolah. Sebaliknya para guru yang bertugas di wilayah tersebut pun tidak memiliki kesempatan yang cukup jika harus pergi meninggalkan sekolah untuk mengikuti kegiatan pembinaan profesional di kecamatan maupun ibukota kabupaten. Jika mereka berangkat untuk mengikuti kegiatan di kecamatan ataupun ibukota kabupaten terpaksa sekolah harus diliburkan, karena minimnya jumlah guru pada sekolah-sekolah tersebut.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembinaan profesional guru SD daerah terpencil, yang dilakukan melalui: (a) *Intensive Development*, dilaksanakan melalui kegiatan: (1) Pelatihan pendidik untuk memenuhi standar kompetensi, (2) Bimbingan teknis peningkatan kompetensi pedagogik guru melalui KKG (Kelompok Kerja Guru), (3) Program Sertifikasi guru, (4) Uji Kompetensi Guru, (5) Sosialisasi ke sekolah-sekolah, (6) Pendekatan

individu (kegiatan diskusi intensif), (7) Pendekatan kelompok (Kelompok Kerja Guru, Workshop dan Pelatihan), (8) Supervisi, (9) Pemberian Motivasi kepada Guru, (10) Meningkatkan kedisiplinan waktu dalam mengajar disekolah, (11) Memberikan penghargaan kepada guru-guru yang berprestasi, (12) Mendorong guru untuk menambah pengetahuannya dengan membaca buku-buku pendidikan agar kemampuan dan keterampilannya terasah; (b) *Cooperative Development*, dilakukan melalui kegiatan: (1) Mengadakan kunjungan guru ke sekolah lain, (2) *Sharing* pengalaman dengan teman sejawat, (3) Aktif dalam kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), (4) Saling mendukung untuk meningkatkan motivasi kerja; dan (c) *Self Directed Development*, dilakukan melalui kegiatan: (1) kreativitas dalam membuat media ajar dengan melihat contoh-contoh yang ada perpustakaan sekolah, (2) aktif mengikuti seminar maupun pelatihan guru, (3) aktif mencari bahan ajar dan materi pelajaran jika memiliki kesempatan untuk mengakses internet di kecamatan maupun ibukota kabupaten.

2. Faktor Pendukung dalam pembinaan profesional guru SD daerah terpencil adalah terjalinnya kerjasama yang sinergis antara Dinas Pendidikan, UPTD-DPK, pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru yang direalisasikan ke dalam program pengembangan profesional guru pada UPTD di wilayah kerja kecamatan Damang Batu baik program rutin maupun insidental yang disesuaikan dengan kebutuhan guru. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam pembinaan profesional guru SD daerah terpencil adalah terkait dengan belum semua guru mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program pembinaan profesional disebabkan oleh kondisi geografis yang sangat jauh dan sukar

untuk dijangkau khususnya melalui akses transportasi darat, terlebih lagi pada musim penghujan.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada para pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas dan UPTD Kecamatan Damang Batu yang telah memberikan kemudahan akses untuk melaksanakan penelitian di wilayah Kabupaten Gunung Mas, serta Redaksi *Equity in Education Journal (EEJ)* yang telah memberikan kesempatan artikel saya dapat dimuat dalam jurnal ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin. (2011). *Kompetensi Guru dan Strategi Pengembangannya*. Yogyakarta: Penerbit LILIN.
- Arnold, P. (2001). Review of Contemporary Issues for Rural Schools. *Education in Rural Australia*, 11 (1), 30-42.
- Bafadal, I. (2003). *Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar: Dalam Rangka Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Collette, A.T., & Chiappetta, E. L. (1994). *Science Instruction in the Middle and Secondary Schools* (3rd Edition). New York: Merrill.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Departemen Pendidikan Nasional.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas. (2010). Laporan Tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas. (2016). Data Hasil UKG Tahun 2015.
- Gaffar, F. M. (1987). *Perencanaan Pendidikan: Teori dan Metodologi*. Jakarta: Depdikbud.
- Glatthorn, A. A. (1995). *Teacher Development*. In: Anderson, L. (Ed.). *International Encyclopedia of Teaching and Teacher Education*. Second Edition. London: Pergamon Press.
- Gorton, R. A. (1976). *School Administration Challenge and Opportunity for Leadership*. New York: Wm. C. Brown Company Publishers.
- Hanson, M. E. (1985). *Educational Administration and Organizational Behavior*. Third Edition. Boston Allyn and Bacon.
- Heslop, J. (1996). A Model for The Development of Teacher in a Remote Area of Western Australia. *Australian Journal of Education*. Vol.21: Iss.1, Article 1. Available at: <http://ro.ecu.edu.au/ajte/vol21/iss1/1>.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). (2012). *Pedoman Uji Kompetensi Guru*. Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). (2015). *Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru*. Jakarta: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
- Khasanah, N. (2014). *Ternyata ini Alasan Pendidikan di Jawa Lebih Berkualitas*. Diakses pada tanggal 20 Juli 2018, dari: <https://www.kompasiana.com/noerchasanahkinar/54f868f5a333113a038b4577/ternyata-ini-alasan-pendidikan-di-jawa-lebih-berkualitas>.
- Koswara, D. D., & Triatna, C. (2011). *Manajemen Pendidikan: Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan*. Tim Dosen

- Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung: Alfabeta.
- McPherson, R. B. (1986). *Managing Uncertainty: Administrative Theory and Practice in Education*. Columbus: Charles E. Merrill Publishing Company.
- Miles, M., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Mulyasa, E. (2013). *Uji Kompetensi Guru dan Penilaian Kinerja Guru*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mustofa. (2007). Upaya Pengembangan Profesionalisme Guru di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pendidikan*, Vol.4 (1).
- Nugroho, P. J. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profesionalisme Guru SD Daerah Terpencil Daratan Pedalaman Kabupaten Gunung Mas. *Prosiding Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2013. Dies Natalis Universitas Palangka Raya*. ISSN: 2354-6727.
- Nugroho, P. J. (2017). Pengembangan Model Pelatihan Inovatif untuk Meningkatkan Kompetensi Guru SD Daerah Terpencil. *Jurnal Sekolah Dasar: Kajian Teori dan Praktik*, Vol.26 (2).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.
- Rohani, N. K. (2004). Pengaruh Pembinaan Kepala Sekolah dan Kompensasi Terhadap Kinerja Guru SLTP Negeri di Kota Surabaya. *Jurnal Pendidikan Dasar*, Vol.5 (1).
- Saud, U. S. (2009). *Pengembangan Profesi Guru SD/MI*. Bandung: Alfabeta.
- Sher, J. P., & Sher, K. R. (1994). Beyond the Conventional Wisdom: Rural Development as if Australia's Rural People and Communities Really Mattered. *Journal of Research in Rural Education*, Vol 10 No 1.
- Siram, R. (1992). *Pelaksanaan Model Sistem Guru Kunjung Suatu Alternatif Pemerataan Pendidikan Sekolah Dasar Daerah Terpencil di Kalimantan Tengah*. Tesis tidak dipublikasikan, PPS IKIP Malang.
- Snyder, K. J., & Anderson, R. H. (1986). *Managing Productivity Schools*. Orlando: Academic Press College Division.
- Supriadi, D. (1990). *Pendidikan di Daerah Terpencil: Masalah dan Penanganannya*. Analisis CSIS No. 5. Bandung: IKIP Bandung.
- Tjalla, A. (2010). *Potret Mutu Pendidikan Indonesia ditinjau dari Hasil-Hasil Studi Internasional*. Diakses tanggal 20 Juli 2018 dari: <http://repository.ut.ac.id/2609/1/fkip201047.pdf>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.